

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN OPINI PADA LKPD SUMSEL BERDASARKAN PENERAPAN SAP

Rika Henda Safitri¹, Bunga Aulia²

rikahenda@unsri.ac.id

Universitas Sriwijaya

Abstract

The purpose of this article is to analyze the factors influencing opinion determination by the Supreme Audit Agency (BPK) based on the application of Government Accounting Standards (SAP) in South Sumatra Province. Using qualitative descriptive method based on Local Government Financial Statement (LKPD) data from South Sumatra Province from 2010 until 2016. The result of the research indicates that the determination of opinion on Local Government Financial Report (LKPD) South Sumatra Province based on several factors such as: (1) The existence of internal control system, (2) Presentation of financial statements not yet in accordance with Government Accounting Standards (SAP) Lack of Human Resources (HR) financial managers to local governments.

Keywords: local government financial statements, opinion determination, government accounting standards

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penentuan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Provinsi Sumatra Selatan (SUMSEL). Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Provinsi Sumatra Selatan dari tahun 2010 sampai 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan opini pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatra Selatan berdasarkan beberapa faktor seperti: (1) Adanya sistem pengendalian internal, (2) Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta (3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Kata kunci : laporan keuangan pemerintah daerah, penentuan opini, standar akuntansi pemerintah

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, masa dimana diberlakukannya kebijakan reformasi menjadikan sektor pemerintah dituntut untuk menuju *good governance* yang bersih dari praktik kecurangan (*fraud*) seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. pertanggung jawaban dalam laporan keuangan pemerintah mengalami perubahan yang lebih baik yang mana ditandai dengan tiga elemen dasar yakni partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk memeriksa dan

mengevaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam tata kelola pemerintah, maka dari itu peran dari pemeriksa atau auditor harus diperkuat. Fungsi pemeriksa bertujuan untuk menjamin laporan pertanggung jawaban (laporan keuangan dari kinerja) disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Auditor dan lembaga audit sektor publik memiliki peran dalam rangka menciptakan proses akuntabilitas publik yang baik. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memiliki

kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam penyusunan audit, BPK RI harus memiliki dasar atau pedoman yakni dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK RI mengenai kewenangan untuk menetapkan standar pemeriksa keuangan negara setelah melakukan kompromi pemerintah pusat maupun daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami (PP NO 71, 2010), sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (Septarini and Papilaya, 2016). Upaya untuk mewujudkan hal tersebut kesungguhan dan komitmen para aparat dalam pemerintahan yang bersangkutan sebagai pelaku dan penyusun laporan keuangan pemerintah daerah bagi yang memerlukan atau pihak yang berkepentingan (Nufus, 2014). Pencapaian opini auditor/BPK-RI mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai tolok ukur perbaikan akuntabilitas keuangan daerah, belum mencapai target yang diharapkan

(Levianny and Roja'i, 2016). Penilaian atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melaksanakan audit setiap tahunnya. Hasil penilaian BPK dinyatakan dalam 4 (empat) bentuk opini yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) termasuk wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP). Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal (BPK, 2014). Dalam SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Maka dari itu, SAP merupakan persyaratan sekaligus menjadi pedoman yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia (PP NO 71, 2010). Hal ini juga didukung dengan penelitian Nugrahem dan Subaweh (2008) yang memperoleh hasil SAP berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pada laporan keuangan (Upabayu, Mahaputra and Putra, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa yang berperan dalam pengambilan keputusan pihak auditor pemerintahan (BPK) dalam pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada pemerintah provinsi Sumatra Selatan. Dari hasil penelitian Sari tahun 2013, faktor yang mempengaruhi penentuan opini terhadap laporan keuangan daerah yakni ditentukan oleh Adanya Sistem Pengendalian Internal (SPI), Penyajian

laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Dengan mendasarkan pada teori yang dikemukakan para ahli, ada beberapa faktor secara umum yang mempengaruhi penerapan SAP, yaitu: sistem pemerintah, karakteristik SDM, dan proses politik (Nufus, 2014). Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Septarini and Papilaya, 2016). Untuk penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan SAP. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda agar dapat dicapai hasil yang lebih baik (Septarini and Papilaya, 2016). Permasalahan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Musi Rawas paling banyak dijumpai terkait kelemahan pada komponen Lingkungan Pengendalian yaitu kurangnya komitmen terhadap kompetensi dan belum optimalnya penegakan integritas dan nilai etika serta kepemimpinan yang belum kondusif dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait, disusul komponen Kegiatan Pengendalian yaitu lemahnya pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan pengendalian fisik, pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya/aset dan pencatatannya, serta pada komponen Penilaian risiko dan Pemantauan, yaitu belum optimalnya

penetapan tujuan dan sasaran pelaksanaan pemantauan berkelanjutan serta evaluasi terpisah terhadap efektivitas pengendalian intern (Leviany and Roja'i, 2016). Hasil dari penelitian sebelumnya yaitu faktor yang menjadi penentu dalam pemberian opini oleh BPK yakni adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI), kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan urgensi masalah yang ada, maka dari itu tulisan ini dibuat sebagai bentuk pengembangan terhadap dunia pendidikan terkhusus spesialisasi audit pada sektor publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah untuk mengkaji faktor penentu BPK dalam memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Selatan yakni:

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap penentuan opini BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Selatan?
2. Apakah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap penentuan opini BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Selatan?
3. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah memiliki peran dalam penentuan opini BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Selatan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan pendekatan deskriptif (descriptive content analysis). Analisis dilakukan

terhadap data kualitatif berupa substansi permasalahan yang diuraikan dalam IKHTISAR IHPS BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan tahun 2010 sampai dengan 2016 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatra Selatan dan juga berdasarkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode dokumentasi. Metodedokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen yang sudah ada (Jayadi, 2014).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa beberapa hasil temuan opini audit yang terjadi dalam pemerintah pusat maupun daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis (hypothesis testing), yang bertujuan menguji hipotesis yang dikembangkan berdasarkan teori- teori yang ada dan diuji berdasarkan data yang terkumpul (Sekaran, 2006). Sumber data yang diperoleh yaitu dengan studi literature. Studi literature adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi tersebut dapat di temukan di buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs – situs di internet.

Untuk mengkaji masalah ini, pihak peneliti mencari sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu berkenaan dengan penetapan opini oleh BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) ditinjau dari penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP). Dilanjutkan dengan teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh, yaitu pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data berupa kasus yang telah

di peroleh melalui beberapa sumber. Tahap – tahap dalam penelitian :

1. Tahap peninjauan pustaka, pada tahap ini akan dikumpulkan data dari sumber kajian pustaka untuk ditarik berbagai hipotesis.
2. Pengumpulan data, pada tahapan ini untuk memperoleh data dan berbagai informasi yang diperlukan.
3. Penggolongan data dan analisa, pada tahapan ini data berupa kasus dari beberapa sumber diolah dengan cara mengelompokkan hasil penelitian terdahulu dengan berbagai macam variabel yang mempengaruhi.
4. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini kesimpulan disempurnakan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, dengan mencari setiap makna dari verifikasi data atau kasus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) untuk wilayah Sumatra Selatan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Maka dari itu, hal tersebut sangat menarik untuk dibahas. Opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Sumatra Selatan telah dipandang memuaskan. Hal tersebut dapat dianalisis melalui ikhtisar hasil pemeriksa BPK yang menyatakan wilayah Sumatra Selatan dalam tiga tahun terakhir mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Maka dari itu, diperjelas menurut penelitian terdahulu, terdapat berbagai faktor yang menentukan pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan(LK) yang di periksa. Dalam penelitian (Nufus, 2014)Sistempemerintah, karakteristikSDM, dan proses politik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerapan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Pemerintah Kota Baubau. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Nufus, 2014). Berdasarkan dari hasil analisis diketahui bahwa variabel kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), sistem informasi keuangan

daerah, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar (Upabayu, Mahaputra and Putra, 2014).

Tabel 1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK

❖ OPINI BPK ATAS LKPD TAHUN 2010 S.D 2016 WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN								
No	Entitas	OPINI						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Provinsi Sumsel	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2.	Kota Lubuk Linggau	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kabupaten OKI	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kota Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kabupaten Ogan Ilir	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
6.	Kabupaten Banyuasin	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kabupaten OKU Timur	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Kabupaten Musi Banyuasin	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Kabupaten OKU Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10.	Kabupaten Lahat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
11.	Kabupaten Empat Lawang	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
12.	Kota Prabumulih	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	Kabupaten OKU	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
14.	Kabupaten Muaraenim	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	Kabupaten Musi Rawas	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
16.	Kota Pagar Alam	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
17.	Kabupaten Muratara	-	-	-	-	TMP	WDP	WDP
18.	Kabupaten Pali	-	-	-	-	TMP	WDP	WTP

Pengujian mendapatkan hasil bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Sebaliknya, semakin kurang baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka akan menurunkan kualitas laporan keuangan SKPD (Triwahyuni, 2016). Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (Sari, 2013). Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemerintah, implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SPI),

penyelesaian temuan audit berpengaruh positif terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Sari, 2013).

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang telah menganut basis akuntansi akrual. Basis Akrual adalah penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (*Cash Basis*). Namun demikian, PP ini juga masih mengakomodasi basis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi

entitas yang belum siap untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, yaitu paling lambat sampai dengan akhir tahun 2014. Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual tersebut, terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), 3. Neraca., 4. Laporan Operasional (LO), 5. Laporan Arus Kas (LAK), 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)., 7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Audit atas Laporan Keuangan

Elder (2009:9) mendefinisikan audit atas laporan keuangan sebagai: *“a form of attestation service in which the auditor issues a written report expressing an opinion about whether the financial statements are fairly stated in accordance with the applicable accounting standards”*. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam audit atas laporan keuangan, auditor menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan opini atas tingkat kewajaran laporan keuangan tersebut.

Opini Hasil Audit atas Laporan Keuangan

Audit atas laporan keuangan menghasilkan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Elder, et al. (2009) mengklasifikasikan opini dan kriteria pencapaian opini hasil audit atas laporan keuangan yaitu wajar tanpa pengecualian (*Standard Unqualified*), wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan (*WTP-DPP*) (*Unqualified with Explanatory Paragraph or Modified Wording*), wajar dengan pengecualian (*WDP*) (*Qualified*), tidak wajar (*TW*) atau

tidak memberikan pendapat (*TMP*) (*Adverse or Disclaimer*).

Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Wewenang untuk melakukan audit/pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan pasal 2 s.d. 4 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Keputusan BPK Nomor : 56a/K/I-XX.2/9/2007) menguraikan metodologi audit pemeriksaan atas LKPD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai acuan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai: *“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”*.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah menyebutkan sasaran pengendalian intern yaitu untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien, (2)

keandalan pelaporan keuangan, (3) pengamanan aset negara, dan (4).ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), Pemantauan (Monitoring). Keterbatasan sistem pengendalian intern tersebut menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) (2013) dapat terjadi karena: kelemahan dalam penetapan sasaran yang merupakan prasyarat pengendalian intern, kesalahan pertimbangan (*judgment*) dalam pengambilan keputusan, kegagalan (*breakdowns*) pada sistem pengendalian intern yang disebabkan kesalahan manusia, kemampuan manajemen untuk melakukan pengabaian atas pengendalian (*management override*), kemampuan manajemen, personil dan pihak lainnya untuk melemahkan pengendalian melalui kolusi, faktor eksternal di luar kendali organisasi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemkab Tabanan melalui penerapan SPI dan SAP. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki SKPD melalui peningkatan penerapan SPIP dan SAP, berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemkab Tabanan.Kompetensi SDM merupakan variabel penentu dalam meningkatkan kualitas LKPD.Kompetensi SDM yang tinggi melalui penerapan SPI dan SAP yang baik dan optimal, mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pemahaman (Sudiaranti and Budiasih, I Gusti Ketut Agung, 2012).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Salah satu bentuk penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pengelolaan keuangan negara/daerah adalah melalui pemberlakuan kewajiban kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, yakni masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan pemerintah daerah itu sendiri (Sari, 2013).

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pemberian opini pada laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) wilayah Sumatra Selatan tahun anggaran 2010 - 2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatra Selatan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)dipengaruhi oleh tiga faktor utama yakni, (1) Adanya sistem pengendalian internal, (2) Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta (3) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan pada pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP).Hasil temuan tersebut berdasarkan opini dari BPK serta penelitian sebelumnya yang di replikasi pada tulisan ini.

b. Saran

Adanya penelitian selanjutnya yang menganalisis faktor – faktor lainnya yang mempengaruhi pengambilan opini dalam pemeriksaan oleh BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat. Diharapkan, indikator pengukuran dan metode penelitian yang digunakan pada peneliti selanjutnya lebih dikembangkan dan spesifik untuk di teliti.

5. DAFTAR PUSTAKA

- BPK (2014) ‘Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I’.
- BPK-RI. 2007. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56a/K/I-XX.2/9/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- Elder, Randal J., Mark S. Beasley, Alvin A. Arens. 2009. *Auditing and Assurance Services: an Integrated Approach*. Thirteenth Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Halim Abdul, Syam K, *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Salemba Empat. Yogyakarta:2014.
- Jayadi, R. T. K. A. (2014) ‘Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Setelah Memperoleh Opini Wtp’, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 5(2), pp. 71–90.
- Levianny, T. and Roja’i, M. (2016) ‘Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera’, *Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), pp. 885–894.
- Nufus, K. (2014) ‘Faktor-Faktor Yangmempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Kota Baubau’, 3(1), pp. 11–17.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan’.
- Sari, D. (2013) ‘Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah , Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan , Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dan B’ , *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, pp. 25–28.
- Septarini, D. F. and Papilaya, F. (2016) ‘Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah’, *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, .VII(2), pp. 100–116.
- Sudiaranti, N. M. and Budiasih, I Gusti Ketut Agung, U. I. G. A. (2012) ‘Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah’ , 4, pp. 1–25.
- Triwahyuni, M. (2016) ‘Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap), Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap

- Kualitas Laporan Keuangan Skpd (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Dumai)', *JOM Fekon*, Vol3 No. 1.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Upabayu, I. P., Mahaputra, R. and Putra, I. W. (2014) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, pp. 230–244